Implementasi Prosedur Kerja Pengawas PAI Sekolah Dasar di Kabupaten Sarolangun

Mohamad Muspawi[1]
Dosen FKIP Universitas Jambi[1]
Email: muspawi01@gmail.com

ABSTRACT
This study aims to determine the empirical condition of the implementation of work procedures for PAI supervisors of primary schools in Sarolangun District. The specific target to be achieved is: 1). Knowing the implementation of the PAI supervisory work procedures for elementary schools in Sarolangun District. 2). Knowing the constraints and solutions for implementing work procedures for PAI supervisors for primary schools in Sarolangun District. Knowing the constraints and solutions for implementing work procedures for PAI supervisors for primary schools in Sarolangun District. The research method used is a qualitative descriptive method, in which the researcher describes the findings of the research in a narrative and what it is. Data collection techniques used are observation techniques, documentation, and interviews. To check the validity of the data, the author makes persistence observation, triangulation, member check, audit trail. And to analyze the data, the authors conduct data review and reduction, data unitization, data categorization, and data interpretation. The results of the study show that: 1. The implementation of the work procedures of elementary school PAI supervisors in Sarolangun district is as follows: a. Get a letter of assignment. b. Visiting the location and conducting coaching. c. Make work reports and submit them to superiors. 2. Constraints and solutions for implementing PAI supervisory work procedures for primary schools in Sarolangun District are as follows: a. Lack of personnel. The solution is by utilizing the MGMP moment b. The distance to some schools is quite far. The solution is to visit the nearest school. c. Access to several schools is quite difficult. The solution is to visit schools that are easily accessible.

Keyword*: Work procedures, PAI Supervisor.*

PENDAHULUAN

Ketepatan pelaksanaan prosedur kerja pengawas merupakan hal yang penting dalam suatu sistem Pendidikan. Hal itu erat kaitannya dengan efektifitas kinerja pengawas itu sendiri dan terkait pula dengan kualitas kinerja para guru yang diawasinya. Oleh karenanya, kegiatan supervisi atau kepengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan di setiap sekolah (Muspawi, 2018:57).

Pengawas atau disebut pula dengan istilah supervisor adalah seseorang yang diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi (Muspawi, 2017:50). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014:7) menjelaskan bahwa Pengawas Sekolah adalah pengawas sekolah/madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Purwanto (2008:76) mengemukakan bahwa pengawasan atau dikenal pula dengan istilah supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Sedangkan tujuan supervisi di sekolah menurut Arikunto (2007:40) adalah untuk memberikan bantuan teknis kepada guru dan staf sekolah yang lain, agar personil tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerjanya.

Tugas pokok pengawas sekolah menurut Kemendikbud (2017:5) adalah: 1. Pengawasan Akademik. Yaitu tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru. 2. Pengawasan Manajerial. yaitu tugas pengawas sekolah yang meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran.

Pengawas sekolah bertugas mengawas atau mensupervisi guru yang ada di sekolah, agar para guru tersebut bekerja sesuai dengan tuntutan yang sudah ditetapkan oleh Negara, salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh guru adalah bekerja dengan memenuhi

kompetensi yang telah ditentukan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi".

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelakasanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan adminstrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. (Dirjen Depag RI, 1999:6). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan PAI di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

Fakta lapangan pada studi pendahuluan, baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan beberapa guru Pendidikan Agama Islam, menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama kabupaten Sarolangun jarang berkunjung ke Sekolah Dasar yang ada di kabupaten Sarolangun, terutama ke sekolah-sekolah yang berada jauh dari kota Sarolangun atau dari tempat tinggal pengawas. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah prosedur yang dijalankan oleh pengawas tersebut telah sesuai dengan petunjuk yang diamahkan oleh negara atau tidak.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri secara mendalam agar dapat diketahui: 1. Bagaimana pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun?. Apa kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun?.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh makna yang lebih mendalam sesuai dengan latar penelitian. Creswell (2012) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif pada umumnya digunakan untuk memahami pengalaman manusia dan untuk mengekspresikan perspektif mereka. Satori dan Komariah (2010) dalam Muspawi (2018:18) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pula atas pertimbangan agar: (1) lebih mudah menyesuiakan jika berhadapan dengan kenyataan ganda; (2) dapat menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; (3) lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus di Sekolah Dasar Negeri yang berada di kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Penelitian dimulai dengan observasi awal lokasi penelitian, dimaksudkan untuk mengenali secara pasti mengenai tempat dilaksanakannya penelitian.

Khusus mengenai sumber data yang berupa subjek atau sampel manusia, pemilihannya dilakukan secara purposive dijelaskan oleh Lincoln dan Guba sebagaimana dikutif oleh Moleong (2010:34) bahwa peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteksnya sendiri dan peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual.

Berdasarkan prosedur *sampling*, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengawas sekolah yang ditugaskan di wilayah Sekolah Dasar Negeri Resort II Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 1 orang, yang merupakan informan kunci bagi penelitian penulis. Sedangkan sebagai informan tambahan penulis tetapkan koordinator pengawas 1 orang, dan para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berjumlah 5 orang.

Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian ini direncanakan melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari : Tahap persiapan, yang terdiri atas survei literatur, survei lokasi penelitian, pengidentifikasian data awal, dan pengajuan proposal. Tahap Pelaksanaan, yang terdiri atas pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan

penyusunan laporan awal. Tahap Penyusunan laporan penelitian, yang terdiri atas persiapan seminar dan pelaksanaan seminar, penyusunan laporan akhir, dan penyerahan laporan akhir.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Observasi

Observasi penulis lakukan secara berkelanjutan, agar diperoleh informasi dari tangan pertama mengenai masalah yang diteliti, dan diketahui kondisi kantor kemenag kabupaten Sarolangun dan Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Sarolangun. Untuk itu, penulis melakukan pengamatan partisipasi aktif dan pasif secara bergantian dengan memperhatikan sifat situasi dan peristiwa yang diamati serta keterlibatan penulis dengan responden.

Wawancara

Pelaksanaan wawancara pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendapatkan data yang cukup sehubungan dengan pokok masalah penelitian yang telah diidentifikasi. Kegiatan wawancara ini penulis lakukan secara berkesinambungan dengan responden dalam berbagai situasi, meskipun kadangkala dilakukan pula dalam situasi yang khsusus.

Studi Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, penulis menggunakan pula teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi ini penulis manfaatkan sebagai bahan triangulasi untuk pengecekan kesesuaian data.

Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini penulis tempuh melalui tahap orientasi dan *overview*, tahap eksplorasi (*focused exploration*), dan tahap *member check*.

Tahap pertama, orientasi dan *overview*. Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menetapkan fokus penelitian. Tahap kedua, eksplorasi (*focused exploration*). Pada tahap ini, penulis mempertajam fokus penelitian agar pengumpulan data lebih terarah dan spesifik. Tahap ketiga, *member check*. Dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan. Tahap ini merupakan tahap untuk memperoleh kredibilitas hasil penelitian.

Pengecekan Kesahihan Data

Untuk mengecek kesahihan atau keterpercayaan data penelitian ini, penulis menggunakan kriteria sebagai berikut: (1) kredibilitas/ derajat kepercayaan; (2) transferabilitas/ keteralihan; (3) dependabilitas/ ketergantungan; dan (4) konfirmabilitas/ kepastian.

Untuk memeriksa kesahihan data hasil penelitian ini penulis menempuh cara-cara berikut ini. 1. Ketekunan Pengamatan, 2. Triangulasi, 3. *Member Check*, 4. *Audit Trail*.

Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan, mengikuti proses sebagaimana yang dianjurkan oleh Moleong (2010:37), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun prosedur analisis data yang penulis tempuh dalam penelitian ini terdiri atas empat langkah berikut ini.

Penelaahan dan Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang sudah disusun dalam laporan, kemudian disusun kembali dalam bentuk uraian terperinci.

Unitisasi Data

Dalam tahap ini penulis membuat batasan untuk setiap satuan data, kemudian mengkodenya sehingga data yang sudah diperoleh ditransformasikan dan diorganisasi ke dalam unit-unit berdasarkan karakteristiknya.

Kategorisasi Data

Dalam tahap kategorisasi data ini penulis memilah-milah sejumlah unit menjadi satu kategori tertentu berdasarkan kesamaan karakteristiknya.

Interpretasi Data

Tahap interpretasi merupakan upaya penulis memaknai data yang telah dikategorisasi dan menggambarkan makna analitik atas unit dan kategori serta keterkaitannya antara satu dengan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur kerja pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada subjek penelitian, dapat dikemukakan bahwa prosedur

kerja pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

a. Mendapatkan surat tugas

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengawas PAI SD kabupaten Sarolangun dapat diketahui bahwa prosedur kerja pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun diawali dengan mendapatkan surat tugas sebagai pengawas, yakni surat keputusan yang ditanda tangani oleh kepala kantor wilayah kemenag provinsi Jambi tentang pengangkatan sebagai pengawas. Hal itu dapat dipahami dari hasil wawancara peneliti dengan pengawas tersebut:

> "Oo, salah satu bentuk prosedur kerja pengawas PAI SD di kabupaten sarolangun ini adalah diawali dengan peneriamaan surat tugas atau surat keputusan yang menyatakan bahwa saya diangkat sebagai pengawas PAI SD di wilayah kabupaten Sarolangun. Maka berdasarkan surat ini saya mulai bergerak untuk menjalankan kewajiban saya sebagai pengawas bagi para guru PAI Sekolah Dasar yang ada di wilayah kabupaten Sarolangun ini"

Penjelasan yang dikemukakan oleh pengawas PAI SD tersebut bersesuaian pula dengan penjelasan yang dikemukan oleh Kholil sebagai koordinator pengawas kemenag kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

> "Prosedur awal sebagai landasan untuk menjalankan tugas bagi seorang pengawas yang berada di bawah naungan kemenag kabupten Sarolangun ini, baik sebagai pengawas Lembaga maupun sebagai pengawas guru bidang studi, maka harus diawali dengan mendapatkan surat tugas atau surat keputusan yang menyatakan mengangkat yang bersangkutan sebagai pengawas di wilayah kerja kemenag kabupaten sarolangun, tanpa itu maka seseorang atau siapapun tidak berhak untuk melakukan kegiatan pengawasan".

Penjelasan yang disampaikan oleh pengawas dan koordinator pengawas tersebut bersesuaian pula dengan fakta lapangan yang penulis temukan pada kegiatan observasi, yang mana penulis melihat secara langsung bahwa pengawas PAI SD kabupaten sarolangun benar-benar memiliki Surat Keputusan (SK) yang menugaskan dirinya sebagai pengawasan di bawah naungan kemenag kabupaten Sarolangun.

b. Mengunjungi lokasi dan melakukan pembinaan

Hal kedua dari prosedur kerja pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun adalah pengawas mengunjungi lokasi sekolah untuk melakukan pembinaan kepada para guru PAI, mengenai perihal itu dapat diperhatikan hasil wawancara dengan pengawas PAI berikut:

> "Secara prosedur, saya selaku pengawas berkewajiban untuk mengunjungi seluruh sekolah yang termasuk ke dalam wilayah kepengawasan saya, alhamdulillah saya telah melakukan itu walaupun banyak kendala dan halangan rintangan dalam pelaksaannya, kendala terberat saya adalah masalah jarak tempuh yang cukup jauh untuk sebagian sekolah, sehingga sangat susah sekali untuk mendatangi sekolah-sekolah yang berada di pelosok-pelosok, apalagi untuk sebagian tempat saya berhadapan dengan kondisi medan jalan yang rusak"

Ungkapan pengawas PAI SD tersebut sejalan pula dengan hasil wawancara dengan koordinator pengawas PAI SD tersebut. Sebagaimana berikut:

> "Diantara prosedur yang wajib dilakukan oleh seorang pengawas adalah mengunjungi sekolah-sekolah yang menjadi kewajiban dan tangung jawabnya, tidak hanya mengunjungi sekolah-sekolah tersebut akan tetapi sekaligus melakukan pembinaan terhadap guru PAI yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Secara teknis di lapangan tentu pengawas bias memetakan sendiri kapan dan bagaimana pelaksanaannya, yang jelas seorang pengawas diwajibkan lebih banyak dilapangan dari pada dikantor"

Ungkapan pengawas dan koordinator tersebut agak berseberangan dengan penjelasan yang diberikan oleh beberapa guru PAI yang mengajar di sekolah-sekolah dasar negeri (SDN) yang berada di kabupaten Sarolangun, diantaranya di Kawasan resort II kecamatan Pelawan, seperti yang terangkum dalam hasil wawancara berikut:

> "Sepengetahuan saya pengawas PAI sangat jarang berkunjung ke sekolah ini untuk melakukan pembinaan secara langsung kepada kami para guru PAI, tapi saya tidak tahu apa kendala sebenarnya yang dihadapinya, barangkali saja dikarenakan oleh jumlah pengawas yang sangat terbatas, sehingga pengawas yang ada kewalahan untuk melakukan kunjungan ke setiap sekolah"

c. Membuat laporan kerja dan menyerahkanya ke atasan

Langkah berikutnya dari prosedur kerja pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun adalah membuat laporan kerja dan menyerahkanya ke atasan, seperti yang terangkum dalam hasil wawancara dengan pengawas PAI berikut:

> "Setelah saya melakukan berbagai kegiatan pembinaan di lapangan atau di sekolah-sekolah kepada para guru PAI, maka langakah berikutnya adalah saya melakukan penyusunan laporan, yang isinya adalah laporan semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan saya terhadap para guru PAI, selanjutnya laporan yang sudah disusun dengan rapid an sudah dijilid saya serahkan kepada atasan saya yaitu koordinator pengawas PAI di lingkup kemenag kabupaten Sarolangun"

Penjelasan pengawas tersbeut sesuai pula dengan penjelsan yang disampaikan oleh koordinator pengawas PAI berikut ini:

> "Ya, memang kewajiban seorang pengawas tidak berhenti sampai pada melakukan pembinaan di lapangan, akan tetapi ada kewajiban lanjutan yaitu membuat atau menyusun laporan secara tertulis dengan lengkap dan rapi, kemudian menyerahkan laporan yang telah dibuat kepada saya segabai atasan mereka, setelah laporan sampai kepada saya, maka saya akan memeriksa laporan mereka apakah telah sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan atau belum, jika telah sesuai maka laporan tersebut diterima tanpa perbaikan, namun jika belum sesuai maka laporan dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki sebagai mestinya"

Kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada subjek penelitian, dapat dikemukakan bahwa kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

a. Kekurangan personil. Solusinya dengan memanfaatkan moment Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Salah satu bentuk kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun adalah Kekurangan personil sedangkan solusinya dengan memanfaatkan moment Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Hal itu dapat dipahami melalui hasil wawancara penulis dengan pengawas sebagai berikut:

> "Kendala yang saya hadapi dalam menjalankan tugas sebagai pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun ini cukup banyak, Salah satu bentuk kendala tersebut adalah kekurangan personil, yang untuk satu kabupaten Sarolangun ini saya hanya seorang diri sebagai sebagai pengawas PAI sekolah dasar. Jadi saya tidak dapat berbuat lebih banyak karena keterbatasan ini. Makanya dalam rangka menyikapi kekurangan tersebut saya membuat solusinya dengan memanfaatkan moment Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dimana para guru PAI Sekolah Dasar se-kabupaten Sarolangun biasanya hadir semua pada acara tersebut, maka saya manfaatkan kegiatan MGMP tersebut untuk dapat bertemu dengan guru-guru PAI Sekolah Dasar se-kabupaten Sarolangun yang hadir"

Penjelasan pengawas tersebut bersesuaian dengan penjelasan yang disampaikan oleh Abdurrahman sebagai salah seorang guru PAI di salah satu SDN resort II kecamatan Pelawan sebagai berikut:

> "Kami dalam setiap tiga bulan sekali mengadakan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh guru PAI yang di kabupaten Sarolangun ini termasuk kami para guru PAI yang mengajar di SDN resort II kecamatan Pelawan ini, kegiatan biasanya juga dihadiri oleh pengawas PAI. Di dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkait profesi kami sebagai guru PAI"

b. Jarak ke beberapa sekolah cukup jauh. Solusinya dengan mengunjungi sekolah yang terdekat.

Selain dari kekurangan personil, maka bentuk lain dari kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun adalah Jarak ke beberapa sekolah cukup jauh dan solusinya dengan mengunjungi sekolah yang terdekat. Hal itu dapat diperhatikan pada hasil wawancara sebagai berikut:

> "Bentuk lain dari kendala pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun adalah Jarak ke beberapa sekolah cukup jauh. Bayangkan

jarak tempuh dari pusat kota atau dari tempat tinggal saya ke lokasi beberapa sekolah dasar ada yang mencapai 100 kilo meter. Ini tentu sangat menyulitkan bagi saya untuk dapat datang ke sekolah tersebut, sementara di satu sisi saya hanya seorang diri sebagai pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun ini. Maka untuk mengatasi kendala ini saya hanya mendatangi sekolah-sekolah yang terjangkau saja, sedangkan untuk sekolah yang jauh saya mengundang guru-gurunya untuk datang pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)".

Penjelasan pengawas tersebut sejalan pula dengan penjelasan yang disampaikan oleh Novi Marlina sebagai salah seorang guru PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

"Menurut pendapat saya, salah satu kendala yang dihadapi pengawas PAI dalam menjalankan tugasnya adalah Jarak beberapa sekolah yang cukup jauh, seperti sekolah-sekolah yang berada di penghujng Batang Asai, jaraknya bisa mencapai 100 kilo meter dari pusat kota kabupaten Sarolangun. Jadi wajar jika pengawas sulit untuk dapat mendatangi seluruh sekolah dasar yang di kabupaten Sarolangun ini, sedangkan beliau hanya seorang diri sebagai pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun ini".

c. Akses jalan ke beberapa sekolah cukup sulit. Solusinya dengan mengunjungi sekolah yang mudah dijangkau.

Selain dari kekurangan personil dan jarak tempuh yang cukup jauh, maka bentuk lain dari kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun adalah akses jalan ke beberapa sekolah cukup sulit, solusinya dengan mengunjungi sekolah yang mudah dijangkau. Hal itu dapat diperhatikan pada hasil wawancara dengan pengawas bersangkutan sebagai berikut:

"Selain dari kekurangan personil dan jarak tempuh yang cukup jauh, maka bentuk lain dari kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja yang saya rasakan sebagai pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun ini adalah akses jalan ke beberapa sekolah cukup sulit, di mana pada titik-titik tertentu banyak jalan yang rusak, sehingga kendaraan sangat sulit untuk melalui jalan tersebut, apalagi kalau sudah musim hujan, banyak jalan yang sulit untuk dilalui terutama bagi jalan yang belum di-aspal. Jadi untuk mengatasi kendala ini saya hanya mendatangi sekolah-sekolah yang akses jalannya bisa dilalui dan terjangkau, sedangkan untuk beberapa sekolah yang jauh saya berusaha untuk mengundang guru-gurunya agar datang pada pertemuan atau kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang biasanya diadakan di wilayah kota Sarolangun".

Penjelasan pengawas tersebut beriringan pula dengan penjelasan yang disampaikan oleh koordinator pengawas PAI sebagai berikut:

"Setalah saya amati, salah satu kendala yang dihadapi pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugasnya adalah akses jalan ke beberapa sekolah yang sulit dilewati. Kita juga memaklumi akan kendala tersebut, karena ini sudah menyangkut masalah faktor alam, jadi kita juga tidak bisa memaksakan pengawas untuk melalui jalan-jalan yang cukup beresiko, tapi yang jelas bagi kita bahwa pengawas harus menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja".

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat dipahami bahwa secara umum prosedur kerja telah dilaksanakan oleh pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun. Namun dalam hal ini penulis melihat dari beberapa sisi sudut pandang:

Pertama; Jika dilihat dari prosedur kerja yang telah dijalankan oleh pengawas PAI SD kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tugasnya, maka secara umum dapat diapresiasi bahwa pengawas tersebut telah menjalankan tugasnya. Yakni diawali dengan mendapatkan surat keputusan (SK) dan surat tugas dari pihak yang berwewenang yaitu dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Jambi, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi sekolah untuk melakukan pembinaan kepada para guru PAI SD, lalu dilanjutkan lagi dengan membuat laporan kerja dan menyerahkanya ke atasan.

Prosedur yang telah dilaksanakan oleh pengawas PAI SD tersebut, jika dilihat dari sisi kesempurnaan pelaksanaan, maka masih menyisakan sejumlah catatan. Catatan tersebut antara lain bahwa tidak semua sekolah yang pernah dikunjungi oleh pengawas, artinya ada beberapa sekolah yang rindu akan kunjungan pengawas, padahal seharusnya pengawas benar-benar sampai ke sekolah untuk melihat secara langsung kondisi sekolah dan melihat secara

langsung bagaimana sesungguhnya guru mengajar di kelas.

Kemudian dalam hal kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas juga masih belum maksimal, padahal jika dilihat dari aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam buku panduan kerja pengawas sekolah Pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbud, 2017:5-6) menjelaskan bahwa tugas pokok seorang pengawas itu ada dua yaitu 1. Pengawasan akademik, 2. Pengawasan manajerial. Pengawasan akademik terdiri atas pembinaan dan pemantauan. Pembinaan dilaksanakan dengan menggunakan Pendekatan, antara lain: direktif, nondirektif, klinik, dan kolaboratif. menggunakan Metode, antara lain: FGD dan metode Delphi, dan menggunakan Teknik, antara lain: teknik individu dan kelompok (kunjungan
kelas dan observasi kelas).

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam supervisi dikenal dengan dua teknik besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual antara lain berupa (1) kunjungan dan observasi kelas (2) *individual conference* (3) kunjungan antar guru-guru (4) evaluasi diri (5) supervisory buletin (6) profesional reading (7) profesional writing, sedankan teknik kelompok antara lain (1) rapat staf sekolah (2) orientasi guru baru (3) curriculum laboratory (4) panitia (5) perpustakaan profesional (6) demonstrasi mengajar (7) lokakarya (8) *field trips for staff personnels* (9) *pannel or forum discussion (10) in service training* dan (11) organisasi profesional. (Dirtendik Kemendikbud RI, 2008:7).

Langkah-langkah kegiatan supervisi PAI sebagaimana tercantum di dalam buku Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam (Dirjen Depag, 1999: 21) sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi: a. Penyusunan program dan organisasi supervisi. b. Menyiapkan instrument atau penjelasan teknis pelaksanaan supervisi dan kebijakan terbaru tentang petunjuk teknis pelaksanaan PAI di sekolah umum dan madrasah.
2. Pelaksanaan. Hal-hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian pengawas dalam melaksanakan kegiatan supervisi, baik di sekolah maupun di madrasah adalah:
   a. Supervisi hendaknya dilakukan secara berkesinambungan.
   b. Supervisi hendaknya dilakukan pada awal dan akhir akhir catur wulan (kalau sekarang semester), hal tersebut dimaksudkan sebagai bahan perbandingan.
   c. Pengawas (supervisor) terampil dalam menggunakan instrumen.
   d. Mampu mengembangkan instrumen supervisi.
   e. Supervisi bukan mencari kesalahan dan bukan pula menggurui, tapi bersifat pemecahan masalah untuk mencari solusi terbaik.
   f. Supervisi hendaknya bersifat mencakup segi teknis kependidikan dan teknis administrasi.
   g. Pengawas/supervisor hendaknya menguasai substansi materi yang disupervisi dan melengkapi diri dengan berbagai instrumen yang dibutuhkan.
   h. Karena supervisi bersifat pembinaan, maka para supervisor harus memiliki kemampuan professional dan wawasan yang luas tentang kependidikan agama Islam.
   i. Dalam pelaksanaan supervisi prinsip KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasin dan simplikasi) hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
3. Penilaian dan tindak lanjut.

Penilaian dan tindak lanjut dijelaskan di dalam buku Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam (Dirjen Depag, 1999: 23) sebagai berikut: a. Penilaian. Penilaian yang dimaksudkan dalam kaitan ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi yang meliputi: 1). Keterbacaan dan keterlaksanaan program supervisi. 2). Keterbacaan dan kemantapan instrumen. 3). Hasil supervisi. 4). Kendala yang dihadapi. b. Tindak lanjut. Adapun tindak lanjut dari kegiatan supervisi antara lain: 1). Langkah-langkah pembinaan. 2). Program seupervisi selanjutnya.

Kedua; Jika dilihat dari sisi rasio kesimbangan antara jumlah pengawas dengan jumlah guru diawasi, maka dengan tegas dapat dikatakan perbandingannya sangat tidak rasional. Yang mana untuk mengawasi guru PAI SD se-kabupaten Sarolangun dibebankan kepada hanya 1 orang pengawas saja. Namun fakta ini ketika penulis konfirmasikan kepada koordinator pengawas dan ketika penulis bertanya mengapa tidak ada pengangkatan pengwas baru, ia

menjawab bahwa hal tersebut terkendala oleh berbagai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yang cukup berat, sehingga pihak kemenag tidak dapat mengangkat pengawas baru dalam waktu dekat dikarenakan sumber daya manusia atau para pegawai yang ada di kemenag kabupaten Sarolangun untuk saat ini tidak ada yang memenuhi persyaratan tersebut.

Namun apapun faktanya, yang jelas permasalahan kinerja pengawas PAI SD di kemenag kabupaten Sarolangun merupakan masalah serius yang perlu cepat dicarikan jalan keluarnya, sebab hal itu terkait kepada banyak hal antara lain kepada efektifitas pelaksanaan pengawasan itu sendiri dan kepada kinerja para guru PAI SD yang di kabupaten Sarolangun.

Ketiga, jika dilihat dari sisi jarak tempuh ke beberapa sekolah yang cukup jauh, maka wajar jika pengawas PAI SD yang ada di kabupaten Sarolangun merasa terkendala untuk mendatangi sekolah-sekolah tersebut secara keseluruhan. Jarak tempuh yang mencapai 100 kilo meter memang dapat dimaklumi menjadi kendala bagi pengawas dalam menjalankan tugasnya. Apalagi mengingat umur pengawas PAI SD kabupaten Sarolangun yang sudah cukup berumur, maka wajar jika yang bersangkutan merasa kewalahan untuk menjelajahi seluruh sekolah dasar yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten Sarolangun.

Alasan jarak tempuh yang jauh tidak dapat juga diterima sepenuhnya untuk tidak mengunjungi sekolah. Karena sebagai seorang pengawas PAI harus bersedia menjalankan sepenuhnya tugas yang amanahkan kepadanya, sebagaimana pengertian dari pangawas PAI itu sendiri yaitu: Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. (Nashori, 2013). Dalam pengertian tersebut dengan jelas tertera bahwa seorang pengawas PAI memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Menurut Maunah (2009) dalam Sobirin (2016:26) bahwa tugas supervisi pendidikan Islam adalah sebagi berikut: 1. Mempermudah tujuan pendidikan Islam di sekolah. 2. Memberikan bimbingan teknik edukatif dan adminstratif. 3. Sebagai penyeimbang antara rencana dan tujuan yang ditetapkan. 4. Sebagai sumber informasi yang objektif. 5. Sebagai mediator antara GPAI dan kepala sekolah. 6. Sebagai alat untuk memperbaiki proses belajar mengajar.

Kemudian kegiatan Pengawas Pendidikan Agama Islam dijelaskan di dalam buku Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah umum (Dirjen Depag, 1999: 12) adalah: 1. Pendidikan. 2. Pengawasan sekolah. 3. Pengembangan profesi. 4. Penunjang.

Selanjutnya Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah umum adalah: 1. Penyusunan program pengawasan PAI; 2. Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI; 3. Pemantauan penerapan standar nasional PAI; 4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan 5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. (Kemenag RI, 2012:4).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur kerja pengawas PAI SD di kabupaten Sarolangun sebagai berikut: a. Mendapatkan surat tugas. b. Mengunjungi lokasi dan melakukan pembinaan. c. Membuat laporan kerja dan menyerahkanya ke atasan. 2. Kendala dan solusi pelaksanaan prosedur kerja pengawas PAI sekolah dasar di Kabupaten Sarolangun sebagai berikut: a. Kekurangan personil. Solusinya dengan memanfaatkan moment Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) b. Jarak ke beberapa sekolah cukup jauh. Solusinya dengan mengunjungi sekolah yang terdekat. c. Akses ke beberapa sekolah cukup sulit. Solusinya dengan mengunjungi sekolah yang mudah dijangkau.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Dasar-Dasar Supervisi,* Jakarta: Rineka Cipta.

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, John W. 2012. *Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research,* 4th ed. USA: Pearson Educational, Inc.

Dirjen Depag RI. 1999. *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam,* Jakarta: Dirjen Depag RI.

Dirtendik Kemendikbud RI. 2008. *Metode dan Teknik Supervisi.* Jakarta: Dirtendik Kemendikbud RI.

Kemendikbud RI. 2017. *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI.

Menpan RI. 1996. *Kepmenpan Nomor 118 Tahun 1996 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Menpan RI.

Kemendikbud RI. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Kemendikbud RI.

Menkumham RI. 2005. *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,* Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Manab, Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif,* Yogyakarta: Kalimedia.

Mukhtar & Iskandar. 2009. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan,* Jakarta: Gaung Persada Press.

Mulyasa, E. 2015. *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah,* Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyono. 2007. *Pedoman Administrasi Bagi Lembaga Pendidikan SMA,* Probolinggo, Diklat Jardiknas.

Muspawi, Mohamad. 2017. *Implementasi Supervisi Akademik pada MAN Insan Cendekia Provinsi Jambi.* Jurnal Ta'dib. Unisba. Vol. VI, No. 2, November 2017.

Muspawi, Mohamad. 2018. *Implementasi Supervisi Keuangan pada MAN Insan Cendekia Provinsi Jambi.* Jurnal Sains Sosio Humaniora. Universitas Jambi. Vol.2. No. 1 Juni 2018.

Muspawi, Mohamad. 2018. *Implementasi Supervisi Manajerial pada MAN Insan Cendekia Provinsi Jambi.* Jurnal An-Nahdhah. STAI Ma'arif Jambi. Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2018.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nashori, *Pengertian Pengawas Pendidikan Agama Islam: http://pai-indramayu.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-pengawas-pendidikan-agama.html.* (diakses, Sabtu, 10-2-2018).

Priansa, Donni Juni & Rismi Somad. 2014. *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: Alfabeta.

Purwanto, Ngalim. 2008. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sahertian, P.A. 2000. *Konsep Dasar: Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bhineka Cipta.

Sobirin. 2016. *Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam dengan Model Cooperative Profesional Development dalam Peningkatan Profesioanalisme dan Kinerja Guru di SMA Negeri Jumapolo,* Tesis IAIN Surakarta.

Syaiful Sagala. 2008. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.